

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Reformasi pendidikan menuju pendidikan inklusif, di Indonesia menuntut adanya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Terkait dengan implementasi pendidikan inklusif, Indonesia masih menghadapi banyak kendala terutama masih terbatasnya akses pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan inti dari Pernyataan Salamanca (1994), dan yang merupakan tindak lanjut dari Pendidikan untuk Semua (Education for All). Inti dari pendidikan inklusif ini tidak sekedar memberi kesempatan pendidikan kepada semua anak, melainkan mencakup peningkatan mutu pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak.

Pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai strategi dalam upaya mencapai pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengupayakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Siapa pun berhak mendapatkan pendidikan dan berhak mendapatkan upaya pelayanan yang berkualitas. Anak-anak mendapat kesempatan belajar pada setting pendidikan yang sama disertai upaya pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif memberikan pelayanan pada semua anak, tanpa diskriminatif artinya tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, intelektual, atau kondisi lainnya. Berarti, dengan pendidikan inklusif sekolah memberikan layanan pendidikan untuk semua anak dengan sistem pelayanan yang ramah

dimana peserta didik memperoleh pendidikan di mana saja yang berorientasi pada kebutuhan belajar semua anak.

Dalam rangka mengimplementasikan pendidikan inklusi, di Indonesia telah melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun yang dasar pemikirannya sejalan dengan pendidikan inklusif bahwa semua anak tanpa kecuali harus mendapatkan layanan pendidikan. Berdasarkan data Depdikbud RI, pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Bali mencapai 93,89%, sehingga masih menyisakan 6,11% anak yang belum mendapat pendidikan di sekolah (Bali Selayang Pandang 1995; 49). Dari 6,11% jumlah anak tersebut tercatat anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang putus sekolah. Berdasarkan data sensus Biro Statistik Kependudukan Provinsi Bali tahun 2000 dari jumlah penduduk 3.165.195 orang sejumlah 957.712 penduduknya putus sekolah pada berbagai satuan pendidikan, 285.817 diantaranya adalah anak kelompok usia 7-12 tahun.

Salah satu penyebab sejumlah anak berkebutuhan khusus yang belum mendapat layanan pendidikan adalah karena terbatasnya sekolah khusus (SLB/SDLB) di Provinsi Bali. Menurut data Dinas Pendidikan tahun 2004 terdapat hanya 17 SLB/SDLB baik negeri maupun swasta di kabupaten/kota yang melayani pendidikan untuk anak-anak tersebut sehingga jauh dari jangkauan tempat tinggal anak.

Demikian juga kesenjangan pendidikan diakibatkan adanya kurang siapnya sekolah dalam hal melayani pendidikan siswa beragam. Banyak anak mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga putus sekolah.

Hal ini dikarenakan adanya sistem sekolah maupun pelayanan guru yang kesulitan dalam mengakomodasi perbedaan individual seperti kecerdasan, gangguan fungsi fisik sebagai faktor hambatan pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya kesenjangan pendidikan bagi kelompok anak penyandang cacat dan putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan tersebut adalah dengan sistem pendidikan inklusif. Dengan sistem ini anak mendapat pendidikan dengan layanan yang berorientasi kebutuhan anak bisa bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya, dengan kondisi sekolah yang sudah siap menerima semua anak.

Menghadapi implementasi pendidikan inklusif dalam kondisi pendidikan sekarang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Suatu inovasi dalam pendidikan inklusif membutuhkan sumber, keterampilan, dan sarana. Demikian juga budaya, sistem nilai-nilai, iklim politik, ekonomi dalam masyarakat berpengaruh pada implementasinya di sekolah. Mr. Lindquist (Unesco,1994; Skjorten, 2003) mengatakan bahwa sistem sekolah harus disesuaikan dengan agar dapat memenuhi kebutuhan semua anak, bukan sistem pendidikan kita yang mempunyai hak atas anak tertentu. Dengan demikian dalam implementasi pendidikan inklusif menunjukkan banyak hal yang harus dibenahi, dan perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi semua anak.

Landasan untuk mencapai tujuan menuju pendidikan inklusif membutuhkan kesepakatan baik itu dari pihak masyarakat mau pun pemerintah agar ada dukungan dalam perkembangan dan pembelajaran siswa di sekolah.

Perkembangan yang menggembirakan dengan dihasilkannya Deklarasi Bandung pada tanggal 8-14 Agustus 2004, sehingga mempercepat terwujudnya pendidikan inklusif. Diperkuat dengan adanya SK No.325/23.C/2002 yang menghimbau pada semua Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia, dimana setiap daerah tingkat II dianjurkan untuk mengadakan uji coba pendidikan menuju inklusi paling sedikit satu sekolah untuk setiap jenjang pendidikan.

Faktor yang paling menentukan dalam menunjang keberhasilan penerapan pendidikan inklusif adalah kesiapan dari unsur masyarakat sekolah itu sendiri. Kesiapan sekolah dimaksudkan bukan saja dengan sosialisasi pendidikan inklusif atau sekolah itu ditunjuk menjadi uji coba pendidikan inklusif, melainkan kesadaran dalam praktik penerapannya dari semua unsur yang terlibat. Kesadaran berlandaskan pemahaman baik dari tinjauan psikologis, filosofis, pedagogis, yuridis, empiris maupun kemampuan dalam implementasi sebagai wujud kepedulian dalam memajukan anak bangsa yang termarginalisasi. Tujuannya agar semua pihak memahami hubungan dan interaksi akan kebutuhan anak. Dipertegas oleh pendapat Watterdal dalam sebuah seminar inklusi dalam uraian makalahnya pada pihak dinas pendidikan dan guru-guru SD di Bali (2003: 3) bahwa visi pendidikan inklusif menciptakan kompetisi yang konstruktif, yang mendorong kreativitas dan keingintahuan, bukan hanya penyesuaian atau kompromi.

Berbagai tantangan dalam sistem pendidikan mempengaruhi terjadinya kesenjangan pendidikan, sehingga tidak semua anak mendapat pendidikan yang layak. Menurut pendapat pihak Subdin PLS/PLB Provinsi Bali dalam pembicaraan informal hambatan pendidikan disebabkan antara lain: sistem

pengaturan siswa terhadap sistem pembelajaran yang berlaku, keadaan sosial ekonomi, kurangnya pemahaman guru terhadap siswa yang berkebutuhan khusus sehingga memprioritaskan pendidikan anak-anak pada umumnya.

Permasalahan umumnya yang dihadapi pada sekolah dasar saat ini, pada setiap jenjang kelas, jumlah siswa 33- 48 orang yang dilayani oleh seorang guru kelas. Menghadapi siswa beragam sejumlah tersebut apakah memungkinkan? Jika dengan sistem pendidikan yang sama, metode yang sama apakah akan berhasil? Apakah dapat pendidikan inklusif menawarkan solusi untuk semua permasalahan yang menjadi tantangan di sekolah-sekolah sekarang ini? Apakah yang dibutuhkan dalam untuk memperlancar terlaksananya pendidikan inklusif?

Demi terlaksananya pendidikan inklusif, dipertimbangkan identifikasi kebutuhan terhadap unsur-unsur yang berperan sekolah agar sekolah siap menerima anak yang berkebutuhan khusus. Dukungan berbagai unsur dimaksudkan agar perkembangan dan pembelajaran dari keseluruhan aspek perkembangan, baik aspek fisik, sosial, emosi dan intelektualnya.

Kesiapan guru dimaksudkan bagaimana guru mempunyai keinginan dan berkemampuan dalam fleksibilitas kurikulum, interaksi yang mengakomodasi keragaman siswa. Kemampuan dan keterampilan guru ditinjau dari peranan guru sebagai pengajar meliputi pemberian kesempatan siswa mengaktualisasi diri, sikap penerimaan akan kelebihan dan kekurangan siswa, menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, pengajaran dengan memahami perbedaan individual, inovasi, kreativitas, dan adanya keinginan dan kemampuan untuk membantu siswa yang mengalami hambatan belajar.

Kesiapan kepala sekolah, mencakup peranan dalam kebijakan dan teknis pelaksanaan program pendidikan disekolahnya. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyamakan persepsi visi dan misi sekolah pada warga sekolah, mengkoordinasi program, monitoring, upaya pengayaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada semua siswa. Demikian juga dukungan dan pada sumber daya manusia, fasilitas dan sarana yang menunjang pembelajaran, aksesibilitas yang memadai, dalam pemenuhan kebutuhan semua siswa.

Kesiapan lingkungan sekolah, dimaksudkan agar anak bisa berkembang dengan baik jika didukung situasi pembelajaran yang menyenangkan, lingkungan yang menerima anak apa adanya. Lingkungan sekolah diharapkan dapat mengembangkan aspek fisik, sosial, dan emosi sehingga tercapai keseimbangan dalam berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran siswa.

Selama ini, pembelajaran umumnya dilakukan secara klasikal sehingga sering terjadi pengabaian pada aspek perkembangan psiko-sosial siswa. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Piaget dalam Johnsen & Skjorten (Eds) (2004: 87), tentang konsepsi pembelajaran anak bahwa "... anak-anak sebagai makhluk sosial yang alami, mereka belajar melalui pengalaman langsung dengan dunia nyata dan melalui aktivitas eksplorasinya sendiri. Perkembangan psiko-sosialnya cenderung diabaikan". Untuk itu guru dalam pelaksanaan pengajaran di kelas sangat penting mempertimbangkan hubungan inter dan antar personal yang sehat sehingga mendorong perilaku belajar siswa yang diharapkan.

Mengingat perkembangan anak satuan pendidikan dasar merupakan landasan bagi perkembangan jenjang berikutnya. Implikasi seorang guru sebagai pendidik di Sekolah Dasar dituntut untuk memiliki pemahaman menyangkut bagaimana guru menggunakan pengetahuan yang dimiliki berhubungan dengan tugas yang dilakukannya; merasakan dan menghayati peran dan fungsinya. Demikian juga kemampuan memahami keunikan masing-masing siswa penghargaan pada bentuk tingkah laku siswa yang beragam, mengakomodasi perbedaan cara belajar, kepribadian dan temperamen, keterampilan dan bakat serta memahami kebutuhan khusus siswa.

Umumnya tindakan pengajaran guru masih berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Interaksi pengajaran yang sepihak membuat pembelajaran tidak bermakna bagi siswa. Untuk itu keterampilan guru pada tindakan pengajaran di kelasnya dituntut fleksibel, menciptakan interaksi yang edukatif agar setiap siswa aktif yang dalam kelompoknya, demikian juga sistem evaluasi. Siswa akan merasa senang jika guru melibatkannya untuk berpartisipasi di dalam kelompoknya, dengan memberikan tugas yang mampu dikerjakannya. Apalagi ditambah dengan penghargaan guru bila tugas dapat dikerjakan siswa dengan baik. Siswa akan lebih memiliki tanggung jawab dalam melakukan tugas dan aktivitas berikutnya. Demikian pula jika siswa mengalami hambatan belajar, diharapkan kerja sama semua unsur sekolah akan mencari solusi terbaiknya bagi kemajuan dan perkembangan siswa. Hal ini memperlihatkan kemungkinan sekolah dalam melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus baik temporer mau pun permanen untuk menyiapkan pendidikan inklusif.



• Berdasarkan uraian di atas pentingnya tinjauan kesiapan sekolah baik fisik maupun non fisik berorientasi untuk menuju pendidikan inklusif. Sekolah yang ramah akan memberi kesempatan pada semua siswa termasuk anak penyandang cacat mendapat pendidikan yang berkualitas. Interaksi pembelajaran yang ramah dari guru bertujuan agar siswa tertentu atau yang berkebutuhan khusus tidak diabaikan, artinya mereka bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bersama teman-temannya yang lainnya. Siswa akan mengalami hambatan belajar jika tidak ada dukungan lingkungan belajar yang akrab dan ramah. Demikian pula dalam hal kebijakan dari kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di sekolah. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti guna menggali sejauh mana kesiapan yang telah dimiliki oleh Sekolah Dasar "X" terpadu untuk menuju pendidikan inklusif.

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan studi pendahuluan di Sekolah Dasar "X" direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali menjadi salah satu sekolah dengan sistem pendidikan inklusif. Untuk menyiapkan suatu sekolah menuju sekolah yang berprinsip pendidikan inklusif perlu adanya berbagai kesiapan baik persiapan fisik maupun nonfisik perlu disiapkan secara serius dan sungguh-sungguh. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah: a) guru-guru Sekolah Dasar "X" yang berperan dalam dukungan perkembangan dan pembelajaran para siswa yang ada di SD "X"; b) Kepala Sekolah Dasar "X" yang memberi dukungan dalam kebijakan program yang terkait pendidikan inklusif. c) lingkungan fisik sekolah

dalam dukungan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Sebagai pertanyaan utama penelitian ini adalah: **“Bagaimanakah kesiapan Sekolah Dasar “X” terpadu menuju pendidikan inklusif?”**

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan utama tentang kesiapan sekolah penelitian tersebut, dapat dijabarkan pertanyaan penelitian yang lebih rinci sebagai berikut:

1. Kesiapan Guru-Guru Sekolah Dasar “X” terpadu menuju pendidikan inklusif sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pemahaman guru-guru tentang pendidikan inklusif?
  - b. Bagaimana kepedulian guru-guru memberi bantuan terhadap hambatan belajar belajar siswa?
  - c. Bagaimana guru-guru mengadaptasikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan khusus siswa?
  - d. Bagaimana interaksi pembelajaran di kelas?
2. Kepala Sekolah Dasar “X” terpadu menuju pendidikan inklusif dalam hal:
  - a. Bagaimana pemahaman kepala sekolah tentang pendidikan inklusif?
  - b. Bagaimana kepala sekolah merencanakan program sekolah yang terkait dengan pendidikan inklusif?
  - c. Bagaimana kepala sekolah mengkoordinasikan program sekolah yang terkait dengan pendidikan inklusif?
  - d. Bagaimana kepala sekolah mengevaluasi dan menindaklanjuti program yang terkait dengan pendidikan inklusif?



3. Bagaimana kesiapan lingkungan fisik Sekolah Dasar "X" terpadu menyiapkan sarana dan prasarana sekolah menuju pendidikan inklusif?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui kesiapan Sekolah Dasar "X" terpadu untuk menyiapkan pendidikan inklusif. Kesiapan sekolah dimaksudkan untuk menelaah gambaran sekolah secara mendalam untuk mengetahui peranan dan hubungan satu unsur dengan yang lainnya yang siap menerima suatu perubahan atau inovasi dalam implementasi pendidikan inklusif.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan kesiapan guru dalam dukungan implementasi menuju pendidikan inklusif yang ditinjau secara khusus dalam hal: pemahaman pendidikan inklusif, kepedulian dalam membantu hambatan belajar siswa, mengadaftasi kurikulum, dan interaksi pembelajaran yang mencerminkan pendidikan inklusif.
- b. Mendeskripsikan kesiapan kepala sekolah dalam dukungan kebijakan sekolah menuju pendidikan inklusif yang ditinjau secara khusus dalam hal: pemahaman pendidikan inklusif, merencanakan program sesuai dengan pendidikan inklusif, mengkoordinasikan program yang terkait dengan pendidikan inklusif, evaluasi dan menindaklanjuti program yang terkait dengan pendidikan inklusif.

- c. Mendeskripsikan lingkungan fisik sekolah dalam pemenuhan kebutuhan khusus siswa yang ada disekolah tersebut yang menyangkut sarana dan prasarana.

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam:

- a. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kota dalam hal mengembangkan pendidikan inklusif pada wilayah binaannya mengenai kesiapan sekolah melayani anak-anak berkebutuhan khusus.
- b. Memberikan masukan pada kepala sekolah dalam kebijakan program sekolah yang terkait melaksanakan pendidikan inklusif.
- c. Memberi masukan pada pihak pusat sumber dalam meningkatkan kerja sama dengan sekolah dalam bantuan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus.
- d. Sebagai rujukan pada peneliti-peneliti lain untuk meneliti fenomena yang lebih dalam lagi dari kesiapan unsur-unsur sekolah dalam menunjang implementasi pendidikan inklusif.

## **D. Konsep Dasar**

Dalam penelitian ini ada dua konsep dasar yang yang menjadi kajian penelitian ini adalah: 1. Menuju pendidikan inklusif; 2. Kesiapan sekolah.

### **1. Menuju Pendidikan Inklusif**

Paradigma Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Indonesia mengalami perubahan yang cukup cepat seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta arus informasi yang semakin deras PLB berkembang melalui tiga tahap, yaitu tahap layanan pendidikan pada sekolah khusus atau segregasi (SLB/SDLB), dimana anak berkelainan dilayani pendidikannya secara formal terpisah dari

sekolah reguler. Mereka dilayani secara khusus dengan program khusus yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kelainannya. Namun demikian, sistem seperti ini memiliki kelemahan, terutama kurangnya motivasi belajar sehingga prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian aspek sosial juga kurang berkembang, dimana anak berkelainan kurang mampu berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakat secara wajar.

Tahap kedua adalah pendidikan terpadu atau integrasi yang memberikan kesempatan kepada anak berkelainan untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman lain pada umumnya dengan metode, materi pelajaran dan sistem penilaian yang sama di sekolah reguler. Dengan demikian, anak berkelainan harus dapat menyesuaikan dengan sistem pendidikan sekolah reguler tersebut. Oleh karena itu, anak berkelainan yang dapat mengikuti pendidikannya di sekolah reguler harus memiliki kemampuan yang sama dengan kemampuan anak pada umumnya. Adapun kelemahan sistem terpadu ini, adalah bahwa anak berkelainan mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya, padahal mereka memiliki hambatan belajar walaupun kemampuannya setara dengan anak-anak lainnya. Sedangkan, kelebihan dari sistem ini adalah pencapaian prestasi akademik yang cukup tinggi apabila diberikan layanan pendidikan yang tepat, dan juga aspek sosial yang lebih berkembang, dimana mereka dapat memasuki lingkungan sosial secara wajar.

Dan tahap ketiga, adalah pendidikan inklusif yang merupakan pengembangan dari sistem pendidikan terpadu. Pada sistem pendidikan inklusif anak berkelainan diberikan kesempatan bersekolah di sekolah reguler terdekat

tanpa memandang jenis dan tingkat kelainan, mulai dari ringan, sedang dan berat. Pada sistem pendidikan inklusif bentuk pembelajarannya disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan khusus anak yang diakibatkan oleh kelainannya. Oleh karena itu, pembelajaran berorientasi kepada anak, bukan kepada isi materi pelajaran.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan dalam upaya membantu siswa dalam mengatasi hambatan pembelajarannya agar mampu dalam menumbuhkan tanggung jawab pada dirinya maka perlu dukungan yang positif. Untuk itu peranan sekolah baik dari guru, kepala sekolah memberi dukungan pembelajaran agar anak mampu berkembang sesuai dengan potensinya. Menurut Shaeffer ( Hidayat, 2003:6) model dan bentuk dukungan pembelajaran, misalnya: lingkungan pembelajaran yang ramah, mudah dijangkau dengan fasilitas yang aksesibel, keterlihatan manajemen yang baik, penghargaan dan penggunaan budaya lokal dan masyarakat lokal serta dukungan program dari institusi pusat sumber.

Tujuan pendidikan di sekolah adalah mengarahkan perkembangan dan pembelajaran anak sesuai dengan potensinya. Tercapainya perkembangan yang positif tidak lepas dari peranan unsur sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah. Peran sekolah dalam memberikan dukungan sistem diamati dari perilaku dalam kemampuan interaksi dalam pemahaman, penerimaan dan pengakuan terhadap siswa sebagai individu. Hal inilah menjadi landasan dalam pemahaman untuk memberi layanan pendidikan pada anak, agar tercapai

perkembangan **psiko sosial** yang sehat antara siswa dengan lingkungan sekolah, sehingga tercapai tujuan pendidikan bagi seluruh anak.

Diantara anak didik yang dilayani oleh sekolah ada beberapa anak didik yang mempunyai hambatan belajar yang menjadi kebutuhan khususnya. Fokus pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan diarahkan pada kebutuhan anak sebagai individu yang utuh, bukan hanya hambatan belajarnya saja. Dengan demikian sekolah sebagai lingkungan anak berkembang menyediakan pembelajaran yang dibutuhkan anak, dengan sistem pendidikan inklusif hal ini bisa tercapai. Anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan bergaul dengan teman-temannya, mereka bisa belajar satu dengan yang lainnya, belajar menghargai perbedaan, dan hal itu berkembang secara alamiah. Menurut Traver (Mahmud, 2003: 21) bahwa ‘...pendidikan inklusif suatu keberadaan dimana anak hanya terdapat satu kesatuan sistem pendidikan formal yang mencakup semua anggota peserta didik memperoleh pelayanan secara wajar tanpa memandang perbedaan status mereka...’

Pendidikan inklusif merupakan strategi agar dapat menjangkau semua siswa dalam sistem pendidikan di sekolah. Sekolah yang berorientasi inklusi merupakan alat untuk memerangi sikap diskriminasi, dengan sistem yang mengupayakan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, memberi dukungan pemenuhan kebutuhan setiap anak dengan karakteristik inklusif adalah sebagai berikut: (1) dapat melibatkan semua siswa, (2) menciptakan interaksi yang kondusif, (3) menggunakan sarana yang mendukung pembelajaran, (4) kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan siswa, (5)

kemampuan guru berdialog dengan siswanya, (6) mendorong terjadinya interaksi diantara anak-anak, (7) mengupayakan kelas menjadi tempat yang menyenangkan, (8) menyiapkan tugas disesuaikan untuk anak, (9) memupuk tanggung jawab kepada anak itu sendiri, (10) memberikan penghargaan atas aspek yang positif dari anak (Skjorten: 2003).

## 2. Kesiapan Sekolah

Menurut Cronbach (Sukmadinata, 2002:157) mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai diperlukan kesiapan, baik dalam hal fisik mau pun psikis. Kesiapan atau *readiness* menurut Good (1973:472) artinya kemauan, hasrat, dan kemampuan untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu. Berdasarkan teori Thorndike suatu aktivitas akan berhasil bila didasarkan oleh kesiapan. Kesiapan dilandasi motif individu yang menggerakkan untuk berperilaku dengan adanya motif-motif (Maslow 1964, teori humanistik & holistik dalam Suherman, 2002) yang merupakan pemahaman terhadap individu karena pemenuhan kebutuhan akan mencapai kepuasan. Dengan adanya motif terbentuknya kemauan, keinginan individu untuk mengambil keputusan maka timbul dalam batin dorongan untuk berperilaku yang menjadi kesadarannya.

Dari tinjauan psikologis yang mempengaruhi perilaku ada tiga domain perilaku yang disebut dengan **Taxonomi Bloom** (Suherman, 2002: 19) yaitu: a) **domain kognitif** (pikiran) meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisa, sintesa, evaluasi; b) **domain afektif** (sikap: penghayatan) yang meliputi penerimaan, penghargaan dan penilaian; c) **domain psikomotor** ( keterampilan) meliputi segala keterampilan motorik dari individu. Berdasarkan hal tersebut di

atas aspek untuk mengetahui suatu kesiapan sekolah dengan melihat kuat dan lemahnya perilaku individu yang berperan.

Kesiapan sekolah untuk menuju pendidikan inklusif merujuk dari laporan dan penelitian Scott- Little & Maxwell (2000: 11) tentang kesiapan sekolah untuk semua anak di North Carolina, yaitu: guru-guru, kepala sekolah dan lingkungan fisik yang merupakan sistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang berperan dalam pendidikan anak di sekolah.

***Pertama, kesiapan guru-guru dalam hal:***

- a. Pemahaman pendidikan inklusif, yang menjadi landasan guru dan kepala sekolah dalam melakukan pelayanan pendidikan untuk semua siswa di sekolah. Pemahaman tentang pendidikan inklusif merupakan cara pandang diaplikasikan dalam pelayanan pendidikan yaitu mempelajari karakteristik siswa yang beragam, tentang hak anak akan pendidikan, dan implementasi pendidikan di sekolah. Hal ini merupakan kesadaran dari guru dalam memahami kemampuan dalam dirinya, menghayati tugas dan peranan sebagai pendidik dengan adanya keyakinan menerima semua anak belajar di kelasnya dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan khususnya.
- b. Kepedulian guru, dalam aspek ini mencerminkan perluasan profesional terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang menekankan bahwa dalam pembelajaran yang positif tergantung pada perasaan puas dalam membantu hambatan belajar siswa. Hal ini menurut Skjorten (2004) didasarkan motivasi guru menghayati apa yang dirasakan siswa (empati), memahami hambatan belajar siswa, perhatian dalam pembicaraan infernal, kata-kata dan kontak

mata yang menyejukkan perasaan siswa dan mengarahkan perilaku siswa yang menyimpang.

- c. Mengadaptasi kurikulum maksudnya adanya keinginan dan kemampuan guru untuk mengadakan penyesuaian terhadap materi, metode, evaluasi yang ditunjukkan pada perubahan sikap dan kemampuan menciptakan solusi yang fleksibel yang memungkinkan siswa belajar di kelas. Menurut Ichrom&Watterdal (Eds) (2004) hal ini ditunjukkan dari sikap penghargaan pada siswa yang mempunyai kebutuhan yang beragam
- d. Interaksi pembelajaran maksudnya kemampuan guru dalam menciptakan interaksi pembelajaran kondusif yang menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, membangun hubungan antar pribadi dengan aktivitas pembelajaran yang menarik minat siswa.(Anderson, Lindgren,1972; dalam Hamalik, 1999: 30)

***Kedua, kesiapan kepala sekolah sebagai administrator dalam hal:***

- a. Pemahaman pendidikan inklusif adalah cara pandang kepala sekolah dalam dukungan terhadap implementasi pendidikan inklusif, tentang penerimaan bahwa semua anak berhak akan pendidikan, dukungan pada guru pada kebijakan program dalam implementasi pendidikan inklusif.
- b. Merencanakan yang dimaksud adalah keinginan, dan kemampuan kepala sekolah dalam memutuskan tujuan kebijakan program sekolah yang terkait pendidikan inklusif. Hal ini didasarkan kesepakatan bersama dengan guru, orang tua dan pihak terkait (komite sekolah) dalam pemenuhan kebutuhan khusus anak.

- c. Mengkoordinasikan program yang dimaksud adalah kemampuan kepala sekolah dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab serta dukungan yang membangun kerja sama antar personal guru-guru dalam program yang terkait dengan pendidikan inklusif. Keberhasilan kepala sekolah dalam mengembangkan program terkait pendidikan inklusif dipengaruhi dari sikap responsif dan upaya pengembangan dengan mengelaborasi untuk mendorong inovasi yang didasari teori Bush (1986) (Rosyada: 2004).
- d. Evaluasi dan tindak lanjut program, yang dimaksud adalah kemampuan kepala sekolah dalam memahami kemajuan dan kelemahan pelaksanaan program yang mencakup : guru-guru yang memberi pelayanan pada anak berkebutuhan khusus, sarana prasarana, kerja sama dengan staf guru dan dinas pendidikan terkait.

*Ketiga*, kesiapan lingkungan fisik yang dimaksud dalam hal: adalah sarana dan prasarana sekolah dimana anak-anak diasuh dengan hubungan kasih sayang dari orang dewasa didukung oleh lingkungan yang didasari pendapat Louisell (1992) ( Winataputra,1978) dengan mempertimbangkan *visibility* (keleluasaan), *accessibility* (memudahkan), *fleksibilitas* (keluwesan) kenyamanan dan keindahan.

Jadi kesiapan sekolah menuju pendidikan inklusif yang dimaksud adalah kemauan, hasrat, dan kemampuan sekolah untuk ikut serta dalam mendorong terciptanya suatu iklim persekolahan yang ramah yaitu sekolah yang memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan siswa. Agar dapat menyentuh kebutuhan khusus siswa guru harus memiliki sikap dan kemampuan yang menjadi karakteristik

pendidikan inklusif. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan guru yang ramah: (1) pemahaman pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, (2) kepedulian guru untuk membantu keterbatasan siswa, (3) mengadaptasi kurikulum agar menyentuh kebutuhan khusus siswa, (4) interaksi pembelajaran yang menumbuhkan minat belajar siswa. Disamping itu kesiapan sekolah yang dimaksud ditunjang peranan kepala sekolah, terkait dukungan sistem dengan kebijakan program sekolah dan sarana dan prasarana lingkungan pembelajaran yang ramah.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kasus tunggal yaitu sekolah. Pendekatan penelitian kualitatif dipandang tepat, karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang fenomena kesiapan sekolah yang kompleks yang sulit dengan memakai pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan pada unsur sekolah yang berperan dalam menyediakan lingkungan pembelajaran siswa yaitu guru-guru dan kepala sekolah. Disamping itu pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan dengan maksud data lebih akurat, memperoleh deskripsi apa adanya.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Fenomena dalam penelitian ini adalah kesiapan sekolah untuk menyiapkan pendidikan inklusif berada dalam ruang lingkup rumusan pertanyaan utama dan ruang lingkup rumusan sub pertanyaan penelitian yang menjadi unit analisis atau kasus dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar "X", di kecamatan Dauh Puri kota Denpasar. Pertimbangannya, sekolah tersebut akan dijadikan pengembangan

pendidikan inklusif sudah pernah mendapat sosialisasi pendidikan terpadu/inklusif. Di Sekolah Dasar "X" telah melayani anak berkebutuhan khusus yang ada di dalamnya dengan keberagaman anak, guru yang beragam dari latar belakang usia dan pengalaman, pendidikan.

Informan adalah guru-guru, kepala sekolah: (a) guru-guru yang menjadi ujung tombak yang bertugas melayani siswa di sekolah tersebut. Penelitian ini dilakukan pada saat sebelum, selama, dan sesudah mengajar di kelas, secara fleksibel yang terkait tentang kesiapan sekolah yang diteliti berdasarkan karakteristik inklusif, (b) kepala sekolah dasar, yang menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, (c) lingkungan fisik sekolah ditinjau secara khusus dalam hal sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Identifikasi keragaman guru sebagai informan dengan pertimbangan: guru yang mendapat sosialisasi pendidikan inklusif, usia, dan pengalaman yang paling lama mengajar anak berkebutuhan khusus. Kelengkapan data penunjang lainnya peneliti mencari informasi pendukung guru-guru lain dan para siswa yang ada di SD "X".

